BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana baru. Tindak pidana yang bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih ini telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an dan ditujukan pada tindakan mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan (pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan pelacuran) untuk membeli perusahaan pencucian pakaian atau *laundramat* (Feo dalam Rajagukguk, 2004:1). Pencucian uang yang terus berkembang, kemudian dinyatakan menjadi suatu perbuatan kriminal pada tahun 1986 oleh Amerika Serikat dan diikuti oleh berbagai negara.

Stessens (2000:3-11) mengungkapkan 2 (dua) latar belakang tindakan memerangi pencucian uang yaitu :

a. Latar Belakang Hukum

Ada beberapa hal yang merupakan kelemahan sebagian besar sistem peradilan di dunia yaitu :

- 1) Hukum gagal menyediakan mekanisme legal yang cukup untuk menangkap pelaku kejahatan yang tidak menimbulkan korban yang secara langsung dapat diketahui.
- 2) Sistem peradilan yang terbiasa dengan bentuk penyitaan yang tradisional yaitu *instrumentum sceleris* (penyitaan alat kejahatan) dan *objectum*

sceleris (penyitaan hasil kejahatan). Sistem peradilan belum terbiasa dengan penyitaan atas uang yang dihasilkan dari kejahatan (*producta / fructa sceleris*).

b. Latar Belakang Sosial Ekonomi

1) Kejahatan Terorganisir

Ada 2 aspek penting dalam kejahatan terorganisir, yaitu :

- a) suatu kejahatan terstruktur untuk menghasilkan keuntungan
- b) tujuan kegiatannya adalah menyediakan barang dan jasa yang ilegal

Pengaruh kejahatan terorganisir akan berdampak pada politik, pejabat dan para penegak hukum yang akhirnya akan bermuara ke pilar yang fundamental di masyarakat modern yaitu peraturan dan pemerintahan yang demokratis. Pencucian uang dimasukkan sebagai tindak pidana dengan harapan akan menjadi suatu alat atau strategi baru untuk mengatasi kejahatan ini. Pencucian uang dilakukan dengan tujuan menjaga uang hasil kejahatan dan memastikan bahwa uang tersebut dapat digunakan tanpa ada penyitaan, untuk itu pelaku kejahatan membutuhkan suatu tindakan yang menghalalkan uang hasil kejahatannya. Kepentingan penegak hukum dalam mendeteksi hubungan antara pelaku kejahatan dan hasil kejahatan mempunyai 2 (dua) sisi sekaligus yaitu :

- a) mendeteksi kejahatan yang telah dilakukan sehingga pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan
- b) mengidentifikasi uang hasil kejahatan sehingga dapat disita.

2) Kejahatan Obat Terlarang

Memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya adalah masalah terbesar yang harus dihadapi oleh masyarakat masa kini, baik domestik maupun tingkat internasional. Kejahatan ini sering kali dihubungkan dengan fenomena kejahatan baru seperti korupsi dan terorisme. Oleh karena sifat kedua kegiatan ini adalah terlarang, maka kegiatan perekonomian yang berkaitan dengannya cenderung meloloskan diri dari pengawasan pemerintah.

Globalisasi dan kemajuan teknologi, menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Kejahatan terorganisir menjadi mudah dilakukan secara lintas negara dan berkembang menjadi kejahatan transnasional. Pemandangan uang dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain yang semakin mudah menyebabkan pencucian uang menjadi semakin marak. Perkembangan ini segera disikapi oleh Negara-negara dengan melakukan kerja sama secara internasional baik yang bersifat global maupun regional.

Badan internasional yang pertama memunculkan pencucian uang adalah *Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory* yaitu berupa Pernyataan Basle yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 1988. Pernyataan yang memandang perlu untuk mengambil tindakan atas pencucian uang agar tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan stabilitas bank, memuat sejumlah prinsip-prinsip etis dan praktek perbankan yang baik antara lain Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). *Basle Committee* dalam pembukaannya menyatakan bahwa pernyataan ini bukan merupakan suatu

dokumen legal dan penerapannya tergantung pada praktek hukum nasional masing-masing negara. (Stessens:2000:16-17).

Pada bulan Juli 1989, G7 membentuk *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai badan kerjasama antar Negara dalam memerangi pencucian uang. FATF ini menghasilkan *Forty Recommendation* pada tahun 1990 yang diperbaharui pada tahun 1996. *Forty Recommendation* merupakan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang dan dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal dan berstandar internasional artinya dijadikan acuan dan pedoman bagi pemberlakuan rezim anti pencucian uang di negara yang bersangkutan (Sjahdeini, 2004:89). Rekomendasi ini meminta negara-negara anggota maupun non anggota untuk mengkriminalisasi pencucian uang, memberikan sanksi pidana baik kepada korporasi maupun individu yang melakukan kejahatan tersebut, memperbaiki atau memperlonggar kerahasiaan perbankan, melaksanakan pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan dan kewajiban menerapkan prosedur identifikasi nasabah yang ketat atau dikenal dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kekuatan pemberlakuan *Forty Recommendation* menjadi semakin meningkat dengan pengadopsian Deklarasi Politik dan *Action Plan* mengenai pemberantasan kegiatan pencucian uang oleh Majelis Umum PBB pada bulan Juni 1998 (Soewarsono dan Manthovani, 2004:30) dan meskipun dalam bentuk rekomendasi, *Forty Recommendation* memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dapat memberikan sanksi *counter measures* pada negara-negara yang tidak memenuhi standard internasional. Sjahdeini (2004:x), Soewarsono dan

Manthovani (2004:38-29) mengemukakan beberapa akibat *counter measures* terhadap negara-negara yang termasuk dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) sebagai berikut :

- a. dikucilkan dari pergaulan internasional terutama di bidang perdagangan dan keuangan
- b. penutupan rekening valuta asing negara tersebut pada bank-bank di negara-negara anggota FATF
- c. larangan membuka atau menerima L/C ke atau dari negara yang terkena *counter measures* sehingga kegiatan ekspor menjadi terganggu
- d. kesulitan memperoleh bantuan internasional
- e. investor enggan untuk menanamkan modal.

Desakan internasional ini menjadi salah satu faktor lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Indonesia sebenarnya telah dimasukkan dalam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) *List*, namun karena lobi Departemen Luar Negeri dan bantuan bimbingan dari negara tetangga yaitu Jepang dan Australia, Indonesia masih terus diberi kesempatan untuk menunjukkan perbaikan, meskipun demikian biaya-biaya

transaksi yang lebih besar harus tetap dibayar oleh lembaga-lembaga keuangan Indonesia (Kompas, 2003: 1).

Reksodiputro (2003:1) menyebutkan perubahan sikap Pemerintah dan perbankan Indonesia yang semula menolak pencucian uang sebagai tindak pidana baru dengan alasan adanya kekuatiran Pemerintah akan menurunnya aliran investasi dari luar negeri dan dalam negeri, menjadi berlomba-lomba mendukung disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pencucian Uang, sebagai suatu sikap ironis dan mungkin merupakan suatu bukti bahwa Pemerintah tidak mempunyai konsep yang konsisten tentang pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

2. Pengertian Pencucian Uang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 memberikan pengertian pencucian uang sebagai berikut :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sjahdeini (2004:5) menyimpulkan beberapa pengertian yang ada dan memberikan definisi pencucian uang sebagai berikut :

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang

berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Soewarsono dan Manthovani (2004:3) memberikan definisi kegiatan pencucian uang secara singkat yaitu :

Suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dana atau penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana menjelma menjadi uang yang sah.

Beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik menjadi definisi dasar pencucian uang yaitu suatu proses untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang sah.

Ada 2 (dua) kejahatan atau kejahatan ganda yang berkaitan dengan pencucian uang :

a. Kejahatan Utama (*Core Crime*)

- 1) Pengelakan Pajak, yaitu memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh (Welling dalam Sjahdeini, 2004:7)
- 2) Penjualan obat terlarang, perjudian, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, penyelundupan imigran gelap dan kejahatan kerah putih.

b. Kejahatan Lanjutan (*Follow up Crime*) yaitu pencucian uang.

3. Dampak Pencucian Uang

Ada beberapa dampak pencucian uang yang kadang-kadang dianggap sebagai “*victimless crime*” (Sjahdeini, 2004 : 17- 27)

- a. Memungkinkan para penjahat memperluas kegiatan operasinya.

Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum dan biaya perawatan para korban

- b. Merongrong sektor swasta yang sah.

Masuknya uang hasil kejahatan ke perusahaan-perusahaan yang sah, memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai dana yang cukup besar sehingga mereka dapat mensubsidi barang-barang dan jasa dengan murah. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan sejenis yang sah tidak dapat bersaing dan akhirnya gulung tikar.

- c. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuidasi karena uang yang baru saja ditempatkan di bank tersebut dapat sewaktu-waktu diambil.

- d. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan dan kestabilan ekonomi

Para pelaku pencucian uang akan berusaha untuk menanamkan kembali dananya di negara-negara yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan kemungkinan mendeteksi yang kecil. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan terhadap jumlah permintaan uang dan meningkatkan volatilitas arus modal internasional, bunga, dan nilai tukar mata uang.

- e. Mengurangi pendapatan negara, khususnya pendapatan pajak karena obyek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya.
- f. Rusaknya reputasi negara karena terkait dengan pencucian uang, akibatnya negara-negara tersebut dikucilkan atau diembargo oleh dunia internasional dan untuk memulihkannya bukan merupakan hal yang mudah

B. Prinsip Mengenal Nasabah

1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah diuraikan dengan cukup jelas dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 yaitu prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Pengertian ini merupakan perincian kegiatan Prinsip Mengenal Nasabah dan tidak mendapat pengertian lain dari pakar hukum dan perbankan.

Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib diterapkan oleh bank meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah

- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003

2. Arti Penting Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank

Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kuat bagi berlakunya Prinsip Mengenal Nasabah yang semula hanya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003.

Prinsip Mengenal Nasabah pertama kali dimunculkan oleh bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa inisiatif pelaksanaan prinsip ini dimunculkan oleh *Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practise* yaitu suatu komite yang pendiriannya bertujuan untuk menjadi forum bagi keperluan diskusi konfidensial berkenaan dengan penanganan masalah-masalah khusus, mengkoordinasikan tanggung jawab pengawasan terhadap bank-bank internasional dan meningkatkan sistem pengawasan dan rambu-rambu kehati-hatian (Sjahdeini, 2004:85).

Pada bulan Desember 1988, *Basel Committee* mengeluarkan *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang berisi *ethical principles* yang harus dianut oleh pimpinan bank. Maksud dikeluarkannya *Statement* yang tidak mengikat secara hukum ini adalah (Sjahdeini, 2004:86) :

- (1) Agar bank menerapkan prosedur yang dapat memastikan bahwa semua nasabah yang melakukan transaksi dengan bank diketahui identitasnya dengan betul
- (2) Agar transaksi-transaksi yang melanggar hukum tidak dilayani oleh bank yang bersangkutan
- (3) Agar bank melakukan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga penegak hukum.

Isi dari pernyataan *Basel Committee* ini adalah integritas dari pimpinan bank dan tekad untuk mencegah bank terlibat dengan pelaku kejahatan merupakan pengamanan yang paling utama. Jika pernyataan ini diperhadapkan kepada pendapat bahwa fungsi utama bank adalah menjaga stabilitas keuangan dan kesehatan bank bukan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank merupakan transaksi yang tidak melanggar hukum, maka perlu dilihat kembali bahwa stabilitas perbankan tidak dapat terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan kepercayaan ini dapat terkikis jika bank terlibat dalam kegiatan pelaku kejahatan. Bank bukan hanya merupakan bagian dari sistem pembayaran dan keuangan nasional saja, tetapi juga bagian dari sistem pembayaran dan keuangan sehingga kepercayaan masyarakat internasional perlu dijaga. Bank dapat mengalami kerugian besar akibat kejahatan (Sjahdeini, 2004:86-87).

Ethical principle kembali mendapat tekanan dalam *25 Core Principles for Effective Banking Supervision* yang termuat dalam *Basel Committee Publications* No. 30 yang dikeluarkan pada bulan September 1997, yaitu pada prinsip ke 15 yang menyebutkan :

Banking supervisors must determine that bank have adequate policies, practises and procedures in place, including strict "know-your-customer" rules, that promote high ethical and professional standards in the bank being used, intentionally or unintentionally by criminal elements.

Perkembangan arti penting pengawasan dan prosedur mengenal nasabah yang diakui oleh semakin banyak orang tidak berjalan seiring dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di perbankan, bahkan dalam pengamatan internal antar bank tahun 1998, *Basel Committee* mengidentifikasi sejumlah besar negara-negara belum melaksanakan prinsip ini atau ada kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan *Basel Committee* minta kelompok antar bank untuk menetapkan standart yang dapat diterapkan pada semua negara dan pada bulan Januari 2001, kelompok tersebut berhasil menerbitkan sebuah *Consultative Document* yang terus menerus ditinjau dan diperbaiki.

Usaha yang cukup serius dari *Basel Committee* menimbulkan anggapan bahwa *Basel Committte* meniru usaha *Financial Action Task Force* (FATF) yang mempunyai wewenang utama memerangi pencucian uang. Usaha yang dilakukan *Basel Committee* mempunyai kepentingan yang mengarah pada perluasan prinsip kehati-hatian yang melindungi keamanan dan integritas sistem perbankan dengan mengadopsi dan menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), khususnya yang berkaitan dengan bank.

Basel Committee Publications No. 85 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2001 tentang *Customer Due Diligence for Banks* menyebutkan arti penting Prinsip Mengenal Nasabah adalah mengurangi berbagai resiko yang ada dalam perkembangan kegiatan usaha perbankan yaitu :

a. Risiko Operasional

- 1) Risiko Operasional adalah risiko kerugian karena kegagalan proses internal, manusia dan sistem, atau faktor eksternal.
- 2) Risiko Operasional dalam konteks Prinsip Mengenal Nasabah terkait dengan kelemahan pada penerapan program, internal kontrol yang kurang baik dan kegagalan melaksanakan *due diligence*

b. Risiko Hukum

- 1) Risiko hukum adalah risiko yang terjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis perjanjian atau perikatan yang dibuatnya.
- 2) Risiko yang mungkin timbul adalah tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendukung, keputusan yang negatif atau kontrak yang tidak bisa dilaksanakan karena kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna yang akhirnya mengganggu operasional atau kondisi bank

c. Risiko Terkonsentrasinya Transaksi

- 1) Risiko Terkonsentrasinya Transaksi adalah risiko yang terjadi karena bank menerima dana dari pihak ketiga dalam jumlah yang besar sehingga terkonsentrasi hanya pada beberapa nasabah

- 2) Pengetahuan yang tidak atau kurang lengkap tentang nasabahnya akan membawa bank pada risiko pendanaan terutama risiko penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau lebih awal dari jangka waktu yang dijadualkan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada likuiditas bank.

d. Risiko Reputasi

- 1) Risiko Reputasi adalah potensi adanya publisitas negatif mengenai kegiatan usaha bank yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan.
- 2) Risiko ini merupakan ancaman utama bagi bank karena karakteristik bisnis bank yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat dan pasar pada umumnya.

Handayani (2004:3) mengatakan bahwa pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Umum tidak hanya dalam rangka pemberantasan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang akan melindungi bank dari berbagai risiko

3. Sasaran Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah ini meliputi :

- a. nasabah bank biasa (*face to face customer*); dan
- b. nasabah bank yang dalam melakukan transaksi tidak melakukan pertemuan langsung / tatap muka / kehadiran fisik dengan petugas bank (*non face to face customer*). Dalam hal ini transaksi biasanya dilakukan dengan cara telepon, surat menyurat atau elektronik.

4. Kaidah Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Perintah (*Gebod*)

Menurut Bruggink, perintah perilaku dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah (sosok) dengan penggolongan yang paling umum adalah Perintah (*Gebod*), Larangan (*Verbod*), Pembebasan (*Vrijstelling*), dan Izin (*toestemming*). (Sidharta, 1999:100-101) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 menyebutkan bahwa Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Hal ini masuk dalam golongan perintah yang penerapannya menjadi tanggung jawab Direksi Bank.

Kewajiban bank atas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi beberapa hal berikut :

- 1) Kewajiban menetapkan dan menerapkan kebijakan penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah serta manajemen resiko.
- 2) Kewajiban membentuk unit khusus dan/atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 3) Kewajiban menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara Negara dan/atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transaction*)

- 4) Kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui Bank

5. Bank yang Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah

Bank yang melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah adalah :

- a. Bank berbadan hukum Indonesia
- b. Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri dengan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah di Negara tersebut minimal sama atau lebih ketat dari yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia, namun apabila lebih ringan maka Bank tersebut wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

6. Sanksi pada Bank

Bank Indonesia memberikan sanksi pada Bank yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 10 September 2004 No. 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan secara rinci tentang pengenaan sanksi yang dikaitkan dengan hasil penilaian sebagai berikut :

- a. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda setelah Bank Indonesia memperoleh pemberitahuan dan atau konfirmasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) :

- 1) Kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,- / hari paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dikenakan dalam hal :
 - a) Bank terlambat menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b dan c Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 - b) Bank terlambat menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 - 2) Kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan dalam hal :
 - a) Bank tidak menyampaikan Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan atau perubahannya kepada Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b dan c Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 - b) Bank tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan

huruf g dan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berupa :

- 1) Teguran Tertulis, dikenakan dalam Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan di atas.
- 2) Penurunan Tingkat Kesehatan Bank Umum menjadi satu tingkat lebih rendah, dikenakan dalam hal Bank Umum melakukan pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan di atas dan hasil penilaian atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tidak Baik karena penerapannya dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk mengurangi risiko terkait. Penurunan tingkat kesehatan Bank Umum tersebut berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan oleh Bank Umum disertai bukti-bukti perbaikan yang diyakini kebenarannya oleh Bank Indonesia.
- 3) Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu, dilakukan terhadap kegiatan usaha yang berisiko tinggi dalam hal pencucian uang namun Bank Umum tidak menerapkan Prinsip Mengenal nasabah secara memadai atas kegiatan tersebut.
- 4) Pemberhentian Pengurus Bank Umum melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota

Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia

- 5) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan dikenakan terhadap

C. Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 menyebutkan :

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah

Pengetahuan kegiatan dan karakteristik transaksi nasabah sangat diperlukan karena tanpa pengetahuan tersebut, Bank akan gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. *Basel Committee Publications* No. 85 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2001 tentang *Customer Due Diligence for Banks* menyebutkan bahwa pemantauan rekening membutuhkan kepekaan resiko dan bank harus mempunyai sistem untuk semua rekening guna mendeteksi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan.

Anwar dalam makalah *Toward Implementing Know Your Customer / Due Diligence Program in The Banking Sector* (2004:11) mengatakan bahwa :

The responsibility of transaction monitoring falls under everybody's responsibility (both frontliner and compliance). The goal is to have account or customer activity monitored for significant or unusual transactions or significant pattern changes. The key is to determine whether a transaction is consistent with the business pattern of the customer and the financial institution should follow up on unusual transaction flagged

Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah diatur lebih lanjut dalam Bab III Pasal 8 – 10 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003; dan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia tertanggal 13 Desember 2001 Nomor 3/29/DPNP yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia tertanggal 4 Desember 2003 No. 5/32/DPNP sebagai berikut :

1. Dokumentasi Profil Nasabah

Ada 2 (dua) kewajiban Bank yang berkaitan dengan dokumentasi profil nasabah, yaitu :

- a. menatausahakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank
- b. melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen tersebut

Prosedur yang dilakukan berdasarkan 2 (dua) kewajiban dokumentasi profil nasabah adalah :

- a. Data base profil nasabah mencakup sekurang-kurangnya data identitas, pekerjaan / bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening
- b. Penyimpanan data dilakukan dengan media yang sesuai dengan kebutuhan bank dan dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait
- c. Jika ada informasi baru mengenai data nasabah, maka harus dilakukan pengkinian data untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individu untuk keperluan intern Bank dan Bank Indonesia
- d. Data base harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan
- e. Penyimpanan data yang berkaitan dengan identitas nasabah dilakukan minimal 5 (lima) tahun sedangkan dokumen keuangan tunduk pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

2. Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi

Bank diwajibkan membuat sistem informasi dengan 2 (dua) kondisi :

- a. dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank
- b. dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan baik untuk keperluan intern dan/atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang

termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Prosedur yang dilakukan berdasarkan 2 (dua) kewajiban dokumentasi profil nasabah adalah :

- a. Bank membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun otomatis tanpa mengurangi tujuan dari pembuatan sistem tersebut
- b. Petugas bank wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut.
- c. Kegiatan pemantauan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah mencakup :

1) Pemantauan rekening

Meliputi pemantauan mutasi rekening secara periodik. Khusus terhadap rekening nasabah yang berisiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif

2) Pemantauan transaksi

Meliputi pemantauan terhadap setiap transaksi tunai dan non tunai

3) Pemantauan transaksi untuk *walk in customer*

Meliputi pemantauan terhadap transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu.

d. Evaluasi hasil pemantauan rekening dan transaksi

Bank melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan transaksi nasabah untuk memastikan tidak adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

e. Tindak Lanjut Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah

Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahuinya

f. Dokumentasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rekening dan Transaksi

Bank wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK

3. Identifikasi Transaksi Yang Mencurigakan

Bank mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dengan gejala yang telah ditentukan dan mendokumentasikan serta melakukan pengkinian jenis, indikator (*red flag*) dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.

Ada beberapa hal yang perlu dipegang saat melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah (Kasim, 2003:34-35)

- a. Perubahan paradigma dalam pelayanan kepada nasabah, jika semula informasi rinci hanya diperlukan dari nasabah debitur (nasabah penerima kredit), maka

sekarang menjadi keharusan pula bagi nasabah kreditur (nasabah penyimpan dana), bahkan bank harus melakukan verifikasi yang lebih ketat (*extensive due diligence*) terhadap :

- a. calon nasabah yang berasal dari Negara yang diklarifikasikan sebagai *high risk countries* atau Negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan *Know Your Customer*
- b. bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang (*high risk business*)
- c. calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*highrisk customer*)
- b. Apabila perlu, melakukan kunjungan setempat (*site visit*) untuk meneliti kesesuaian kondisi kegiatan usaha nasabah dengan volume usaha dan arus kas
- c. Memastikan bahwa dokumen yang diserahkan adalah dokumen asli dan berhati-hati terhadap nasabah yang tidak mau menyerahkan dokumen yang diperlukan.
- d. Mampu mengidentifikasi “*red flags*”, antara lain yang terkait dengan geografi (*drug producing nations, drug transshipment countries*, dan lain-lain), *account opening* (menolak memberikan informasi yang terkait dengan tujuan usaha), *on going monitoring* (elektronik transfer dari Negara/yurisdiksi rahasia tanpa alasan yang jelas atau tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah, pembayaran atau penerimaan yang tidak ada hubungan yang jelas dengan kontrak yang sah, penjualan barang atau pemberian jasa).

D. Rahasia Bank

1. Arti Penting Kerahasiaan Bank

Asas kerahasiaan / konfidensialitas di perbankan mengalami perkembangan sebagai berikut : (Djumhana, 2000:161)

- a. Pada abad pertengahan, asas ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kerajaan Jerman dan kota-kota Italia bagian utara
- b. Sejak perdagangan makin berkembang dan perjuangan hak-hak individu semakin gencar, kerahasiaan keuangan dan pribadi nasabah merupakan kebutuhan mutlak bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan
- c. Menjelang pertengahan abad 19, semua pemerintah di Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan perbankan dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa kerahasiaan bank merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Kepercayaan masyarakat yang lahir apabila ada jaminan bank bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan, menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menjaga kerahasiaan sebagai timbal balik kepercayaan yang diberikan oleh bank. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank (Sunggono, 1995:54).

Tim Penelitian Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah (1995:44-45) memandang rahasia bank sebagai salah satu faktor yang mendukung kepercayaan dan kepentingan masyarakat adalah mutlak harus dilakukan oleh bank karena masyarakat yang menyimpan dananya pada bank semata-mata hanya karena kepercayaan dan tidak menerima jaminan yang bersifat kebendaan. Tim ini (1995:90-91) juga menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan dengan maksud untuk menjaga privasi nasabah dan keamanan dana tersebut dari kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak dengan cara-cara yang canggih.

Setijoprodjo (dalam Bako,1995:53) mengatakan bahwa dasar pemikiran adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :

- a. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak diikutcampurkan atas masalah yang bersifat pribadi
 - b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dengan nasabahnya
 - c. Atas dasar ketentuan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menugaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank.
 - d. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan
 - e. Karakteristik kegiatan usaha bank.
- Pengecualian terhadap penerapan ketentuan rahasia bank melalui ketentuan yang sifatnya limitatif dengan berlandaskan kepentingan umum dan negara

2. Pengertian Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank dikenal dalam setiap undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia :

a. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan,
Penjelasan Pasal 36

Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/337.UPPB/pbB perihal Penafsiran tentang Pengertian Pengertian Rahasia Bank tanggal 11 September 1969 memberikan penafsiran resmi tentang hal-hal yang dirahasiakan oleh Bank adalah :

- i. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercatat dalam semua pos pasiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian dalam berbagai bentuk kepada yang bersangkutan
- ii. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu :
 1. pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri
 2. pendiskontoan, dan jual beli surat berharga
 3. pemberian kredit

Ruang lingkup rahasia bank yang diberikan ini dirasakan sangatlah luas (Djumhana, 2000:163)

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 16

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Penjelasan pasal 40 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan

keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Pengertian ini masih dianggap terlalu luas dan sangat kaku sehingga sering dijadikan pelindung oleh debitur nakal, orang yang beritikad tidak baik, dan perbuatan melawan hukum dengan menghambat pihak tertentu untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan perbankan (Djumhana, 2000:163).

c. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 28

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada undang-undang ini, ruang lingkup rahasia bank dipersempit atau dibatasi yaitu menyangkut : (Usman, 2001:154-155)

- a. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (tidak termasuk debitor dan pinjamannya)
- b. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang
- c. Situasi tertentu dimana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya boleh saja diberikan oleh pihak yang yang terkena larangan, jika informasi tersebut tergolong informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank

Hal ini menyebabkan bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat (*fiduciary financial institution*) diperhadapkan pada 2 (dua) kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali menimbulkan konflik kepentingan atau *conflict of interest* (Usman, 2001:155) sebagai berikut :

- a) Bank punya kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*)
- b) Bank juga wajib untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.

3. Teori Kekuatan Berlaku Rahasia Bank

Ada dua teori tentang kekuatan berlaku rahasia Bank : (Fuady, 1999:91)

- a. Teori Mutlak, dalam hal ini rahasia keuangan nasabah tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam hal apapun
- b. Teori Relatif, dalam hal ini rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal yang khusus, sedangkan dalam hal-hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank dapat diterobos.

Usman (2000:155) mengatakan bahwa teori yang bersifat mutlak terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan, sedangkan teori relatif berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat. Indonesia menganut Teori Relatif. Pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan apabila ada suatu kepentingan umum yang berupa kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang negara, peradilan, dan kegiatan perbankan dengan adanya ijin khusus dari Bank Indonesia atau bank tersebut atas permintaan pihak terkait.

Chorley (Fuady, 1999:97) mencatat perkecualian terhadap rahasia bank yang bersifat universal pernah diberikan dalam kasus *Turnier v. National Provincial and Union Bank of England* di Inggris pada tahun 1924, yaitu bahwa rahasia bank dapat dibuka jika :

- (i) *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku
- (ii) ada kewajiban (*duty*) kepada public untuk membuka rahasia tersebut
- (iii) kepentingan bank menginginkan dibukanya informasi tersebut
- (iv) *disclosure* dilakukan dengan persetujuan (dengan tegas atau tersirat) dari pihak nasabah

4. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Ada 2 (dua) jenis sanksi yang ditetapkan oleh Undang-undang Perbankan terhadap pelanggaran rahasia bank yang dapat diringkas sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Sanksi	
		Pidana	Administratif
1	Tanpa membawa perintah tertulis atau ijin dari BI sebagaimana disebut dalam Pasal 41, 41 A dan 42 sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan	Minimal : 2 tahun Maksimal : 4 tahun	Minimal : Rp. 10 miliar Maksimal : Rp. 200 miliar
2	Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan	Minimal : 2 tahun Maksimal : 4 tahun	Minimal : Rp. 4 miliar Maksimal : Rp. 8 miliar
3	Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan 44 A	Minimal : 2 tahun Maksimal : 7 tahun	Minimal : Rp. 4 miliar Maksimal : Rp. 14 miliar

Sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip perbankan mempunyai ciri khas sebagai berikut : (Fuady, 1999:97)

- a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman maksimal
- b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif

- c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Prinst, 2001:8)

Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain sekalipun hak asasi berakar di dalam martabat dan harkat manusia secara pribadi. Magnis Suseno dalam makalah Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosio-Kultural dan Religi di Indonesia (1997:57) mengatakan bahwa hak asasi manusia bukan mendukung penyebaran individualisme melainkan membendungkannya. Hak Asasi adalah sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok, maupun golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Hak asasi dipandang bukan sebagai

hak-hak hukum (*legal rights*) meskipun sering tampil dalam sistem hukum domestik maupun internasional, melainkan sebagai hak-hak moral yang berlaku secara universal (*universal moral rights*) (Nickel, 1996:6)

Pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia tergantung kepada pelaksanaan kewajiban dasar manusia. (Prinst,2001:9) Adapun kewajiban dasar manusia menurut Bab IV Pasal 67-70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi :

- a. Wajib patuh pada peraturan perundang-undangan
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
- c. Menghormati hak asasi manusia dan hak asasi orang lain
- d. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

2. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (Nickel, 1996:4)

- a. Hak asasi adalah hak, artinya merupakan norma yang pasti, memiliki prioritas tinggi dan penegakannya bersifat wajib.
- b. Bersifat universal, artinya dapat diterapkan di seluruh dunia
- c. Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu
- d. Hak asasi manusia dipandang sebagai norma yang penting. Meski seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat

kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia

- e. Hak asasi manusia mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Pemerintah dan orang-orang yang berada dimanapun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang
- f. Hak asasi manusia menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak, artinya jumlahnya tidak banyak tetapi bersifat umum

Nickel (1996:10-15) mengatakan bahwa dalam perkembangannya hak asasi manusia yang ada saat ini lebih bersifat sebagai berikut :

- a. Egalitarianisme, yang terlihat pada :
 1. lebih menekankan pada perlindungan dari diskriminasi dan kesamaan di hadapan hukum
 2. Pencantuman hak kesejahteraan, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemerintah untuk mengganggu rakyat

- b. Kurang Individualisme

Manusia dipandang sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, bukan sebagai individu yang terisolasi. Hak-hak kelompok dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mengawasi sumber-sumber alam mereka.

c. **Memiliki fokus internasional**

Hak asasi manusia tidak hanya diwajibkan secara internasional tetapi juga menjadi sasaran aksi dan keprihatinan internasional.

3. **Unsur-unsur Hak**

Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (Nickel, 1996:20-25)

- a. Hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik
- b. Hak adalah suatu kebebasan
- c. Hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi penanggung jawab atau pihak yang harus menghormati hak tersebut.
- d. Bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma lain. Bobot ini berkaitan dengan apakah suatu hak kadang-kadang dapat dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain dalam suatu konflik. Penegasan bahwa hak adalah pertimbangan normatik yang kuat tidak mengandung arti bahwa bobotnya absolut dan tidak ada pengecualian. Bobot suatu hak adalah relatif terhadap pertimbangan-pertimbangan lain yang berlaku dalam konteks tertentu. Hak sebagai *prima facie* berarti hak sejati yang sesekali dapat dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan lain.

F. Hak Kebebasan Pribadi

Hak atas privasi (kehidupan pribadi) dan otonomi (kebebasan dari intervensi terhadap rumah tangga) dilihat sebagai penangkal bagi intervensi terhadap wilayah pribadi yang meliputi upaya pemerintah untuk mengawasi

bidang kehidupan yang paling pribadi. (Nickel, 1996:11) Hak atas kebebasan pribadi telah dikemukakan oleh Locke sebagai salah satu dari 3 (tiga) hak umum yang kemudian digantikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyebutkannya sebagai hak di dalam Pasal 3.

Eksistensi hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan pribadi sangat beraneka ragam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan benturan antar hak asasi manusia dan antara hak asasi manusia dengan norma-norma lain (Nickel, 1996:70). Hak memiliki sifat tersendiri tidak hanya dalam prioritasnya yang tinggi, baku, dan mengikat melainkan dalam ciri wajibnya. Hal ini berarti hak bukanlah jaminan sempurna dan amat beragam dalam derajat kekhususannya.

Hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian. Hak serupa dapat ditemukan juga dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Konvensi Amerika.

Hak kebebasan pribadi atau dikenal sebagai hak privasi di Amerika meliputi berbagai bidang yaitu pendidikan (*Education Information*), telekomunikasi (*Telecommunications Information*), kesehatan (*Health Information*), kendaraan bermotor (*Motor Vehicle Information*), komunikasi (*Communications Records*) dan keuangan (*Financial Information*). Ada beberapa

hal yang dilindungi dalam privasi di bidang keuangan, tetapi yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini adalah *The Right to Financial Privacy Act of 1978* (RFPA 1978) (Stevens, 2003:8-15).

Perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan campur tangan Negara terhadap kebebasan pribadi warga negaranya bahkan Konvensi Eropa secara tegas menyebutkan secara tegas alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar bagi para penguasa boleh mencampuri kebebasan pribadi individu sebagai berikut: (Baehr, Dijk, Nasution dan Zwaak, 2001:214-215)

Seorang penguasa Negara boleh melakukan campur tangan hanya berdasarkan undang-undang dan apabila perlu, dalam suatu masyarakat demokrasi, untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan umum, atau kesejahteraan ekonomi Negara, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.